

## GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas

Tanggal : 28 Januari 2011

Subyek : Bencana Merapi

Hal : 22

### **PASCA BENCANA Radius 10 Kilometer di Merapi Dikosongkan**

YOGYAKARTA, KOMPAS - Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman akan mengosongkan wilayah dalam radius 10 kilometer dari puncak Gunung Merapi. Rencana tersebut akan dimasukkan dalam rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Sleman.

Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu mengatakan tengah mengajukan rancangan peraturan daerah RTRW Sleman 2011- 2030. Antisipasi terhadap dampak erupsi Merapi dimasukkan dalam draf. "Erupsi 2010 menimbulkan 285 korban jiwa di DIY dan menjadi pelajaran baik bagi masyarakat ataupun pemerintah," katanya dalam seminar RTRW pascaerupsi Merapi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Kamis (27/1).

Pemkab Sleman memasukkan rencana pengosongan wilayah dalam radius 10 km dari puncak Merapi. Wilayah itu akan menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Merapi.

Menurut Yuni, hal itu karena Pemerintah Kabupaten Sleman mengakomodasi rekomendasi Balai Penyuluhan dan Pengembangan Teknologi Kegunungan (BPPTK) Yogyakarta.

Yuni mengakui, pengosongan wilayah bukan hal mudah. Ada puluhan ribu jiwa yang tinggal di wilayah itu. Pihaknya kini menyiapkan rencana merelokasi warga. Salah satunya, menyiapkan lahan pengganti di lereng Merapi yang layak ditinggali. "Pemerintah provinsi (pemprov) yang menentukan lahan mana yang diperbolehkan dan tidak," katanya.

Selain lahan pengganti, Yuni menyinggung rencana pembelian lahan milik warga yang tinggal di radius 10 km dari puncak Merapi. Hal itu perlu biaya besar.

Kepala BPPTK Yogyakarta Subandriyo menuturkan, erupsi Merapi yang terakhir mengubah peta kawasan rawan bencana (KRB) Gunung Merapi. Jangkauan awan panas di KRB III mencapai 15 km. Karena itu, BPPTK merekomendasikan agar KRB III tidak dijadikan sebagai lokasi hunian tetap.

Menurut Subandriyo, meski berat untuk dilaksanakan, pengosongan kawasan dalam radius 10 km dari puncak Merapi menjadi prioritas.

Untuk mencegah makin parahnya banjir lahar dingin, Pemprov Jawa Tengah menginstruksikan Pemkab Magelang, Boyolali, dan Klaten untuk melarang penambangan pasir di KRB I. Untuk itu, disediakan program padat karya pascaerupsi senilai Rp 6,1 miliar.

"Penambangan di KRB I sangat berbahaya karena dapat mendorong luncuran material vulkanik makin besar ketika hujan. Penambangan harus dihentikan, hujan masih terus terjadi hingga April 2011," kata Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jateng Priyantono Djarot Nugroho, Kamis, terkait dikeluarkannya peta rawan bencana Gunung Merapi di Jateng dan DI Yogyakarta terbaru oleh BPPTK.

Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengatakan, penambangan pasir di KRB I berbahaya bagi lingkungan dan harus dihentikan.

Sementara itu, bank perkreditan rakyat (BPR) di DI Yogyakarta meluncurkan kredit modal kerja bagi korban letusan Merapi. Plafon yang disediakan Rp 10 miliar, dengan kredit maksimal Rp 20 juta per debitor.

Kredit Membangun Ekonomi Rakyat (Mekar) itu merupakan program bersama 64 BPR dan BPR Syariah di DIY. Tujuannya, mendukung pengembangan usaha ekonomi kecil dan menengah di DIY pascaerupsi Merapi pada akhir 2010.

Menurut Ketua Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan BPR Indonesia DIY Tedy Alamsyah, kredit Mekar diluncurkan pada 25 Januari. (ARA/WHO/IDR)